

Pembentukan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Sumenep

Ach. Yasin

Universitas Negeri Surabaya

Moch. Khoirul Anwar

Universitas Negeri Surabaya

Sri Abidah Suryaningsih

Universitas Negeri Surabaya

A'rasy Fahrullah

Universitas Negeri Surabaya

Ahmad Ajib Ridlwan

Universitas Negeri Surabaya

Adam Damanhuri

Universitas Negeri Surabaya

Abstract

Sumenep Regency is divided into two land areas and an archipelago. It has 27 sub-districts and 328 villages. Sumenep Regency, in 2009, had an area of 29,895 hectares of rice fields with a production level of 1,784,245.8 quintals. Sumenep Regency has agricultural land and plantations that can produce rice, corn, and beans. Meanwhile, plantations produce superior products in the form of cassava and tobacco. In addition, Sumenep also has types of cows and goats that can also be developed. Despite its vast land area, the region lacks an effective agricultural cooperative to maximize production and enhance livestock value. Therefore, the team community service assists the community in preparing for the establishment of a cooperative to optimize the output and provide added value to the community. Establishment documents designed include photocopies of the ID cards of the 22 founders, AD-ART draft, power of attorney to manage the formation of cooperatives, activities for at least the next three years, and revenue budget draft. Other documents created are the composition of the management, documents establishing the cooperative, and other documents required for establishing the cooperative. After all the administrative files have been prepared, they are submitted to the Dinas Koperasi dan UMKM office for approval from the relevant agencies. This assistance is expected to assist farmers and ranchers in increasing productivity and providing added value to agricultural and livestock products in the Sumenep district.

Keywords: *Added value; Agricultural and livestock products; Increasing productivity; Sharia cooperative; Sumenep*

Abstrak

Kabupaten Sumenep terbagi menjadi dua wilayah daratan dan kepulauan; memiliki 27 kecamatan dan 328 desa. Kabupaten Sumenep, pada tahun 2009, memiliki luas areal persawahan 29.895 hektar dengan tingkat produksi 1.784.245,8 kuintal. Kabupaten Sumenep memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang dapat menghasilkan padi, jagung, dan kacang-kacangan. Sementara perkebunannya menghasilkan produk unggulan berupa singkong dan tembakau. Selain itu, Sumenep juga memiliki jenis sapi dan kambing yang juga bisa dikembangkan. Meski memiliki lahan yang luas, Sumenep belum memiliki koperasi yang dapat mengoptimalkan produksi dan memberikan nilai tambah bagi hasil pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, Tim PKM mendampingi masyarakat dalam mempersiapkan pendirian koperasi untuk memaksimalkan *output* dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Dokumen pendirian yang dirancang antara lain fotokopi KTP 22 pendiri, draft AD-ART, surat kuasa mengurus pembentukan koperasi, kegiatan minimal tiga tahun ke depan, dan rancangan anggaran pendapatan. Dokumen lainnya yang dibuat adalah struktur kepengurusan, dokumen pendirian koperasi, dan dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam pendirian koperasi. Semua berkas administrasi yang telah disiapkan kemudian diserahkan ke Dinas Koperasi dan UMKM untuk mendapat persetujuan dari instansi terkait. Hasil dari pendampingan ini diharapkan dapat membantu para petani dan peternak dalam meningkatkan produktivitas dan memberikan nilai tambah terhadap hasil pertanian dan peternakan di Kabupaten Sumenep.

Kata kunci: Hasil pertanian dan peternakan; Koperasi Syariah; Nilai tambah; Peningkatan produktivitas; Sumenep

1. Pendahuluan

Saat ini, dunia dihadapkan pada perkembangan dalam berbagai bidang dengan cepat. Hal ini dapat dilihat dari perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya dalam bidang ekonomi yang tadinya berbasis sumber daya alam, kini memasuki era ekonomi kreatif yang mengutamakan sumber daya manusia dan teknologi. Perubahan tersebut merupakan dampak dari globalisasi ekonomi. Akibatnya, terjadi persaingan bebas yang sangat ketat. Pihak yang kuat dan berdaya beli tinggi akan menguasai pasar dan menjadi pemenang dalam persaingan tersebut. Sebaliknya, pihak yang lemah dengan daya belinya yang rendah secara otomatis akan tersisih dari lingkup persaingan dan akan menjadi penonton yang pasif dalam perdagangan.

Indonesia sebagai negara yang masih terus berkembang sudah semestinya berupaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing perekonomian bangsa agar tidak semakin tertinggal dengan negara lain. Sesuai dengan kandungan UUD 1945 dan GBHN yang mengatakan bahwa sistem perekonomian disusun berdasarkan atas dasar kekeluargaan yang menyangkut tiga pelaku ekonomi, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta (badan usaha milik swasta [BUMS]), dan koperasi adalah yang paling sesuai dengan Indonesia sebagai negara yang mempunyai falsafah ideologi yang berbeda dari sistem ekonomi kapitalis maupun komunis. Ketiganya diharapkan mampu menopang perekonomian negara.

Perkembangan koperasi di Indonesia cukup pesat. Namun, sejalan dengan kepesatan tersebut, banyak juga koperasi yang tidak aktif. Ketidaktifan tersebut disebabkan banyak faktor kelemahan yang dimiliki koperasi. Salah satu kendalanya adalah pengelolaan koperasi. Padahal, jika hal ini dilakukan secara profesional, akan mendatangkan manfaat yang luar biasa, khususnya bagi anggota [1]. Oleh sebab itu, perlu langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai kelemahan internal koperasi [2]. Tabel 1 menggambarkan data perkembangan koperasi di Indonesia dari tahun ke tahun. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa jumlah koperasi yang aktif cukup fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan, baik nasional maupun regional Jawa Timur setiap tahunnya. Tahun 2019, penurunan mencapai hampir 1% di tingkat nasional dan lebih dari 3% untuk regional Jawa Timur [3], walaupun pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan kuantitas atau jumlah koperasi tidak diikuti oleh perkembangan kualitasnya.

Koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa memiliki potensi yang baik dalam menghadapi tantangan persaingan yang terjadi. Potensi ini sangatlah bergantung kepada pengelola koperasi yang mampu bersifat proaktif, kreatif, dan inovatif dalam mengantisipasi segala hal yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Pengelolaan koperasi perlu didasarkan pada pembangunan pemahaman dan kesadaran akan jati diri koperasi [4]. Pengelolaan yang baik akan membawa dampak positif terhadap koperasi sehingga mampu berkembang dengan pesat.

Salah satu jenis koperasi dilihat dari pembagian koperasi adalah koperasi pertanian. Koperasi pertanian (koperta) dapat mengupayakan kebutuhan usaha tani yang dibutuhkan anggota, misalnya: (1) mengusahakan pembelian bibit, pupuk, obat hama, dan alat-alat pertanian supaya produktivitas pertanian bertambah; (2) mengelola hasil pertanian dari tingkat bahan hingga digiling menjadi hasil siap jual; (3) memberikan pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan; (4) mengupayakan pasar penjualan hasil pertanian; dan (5) mendidik petani berorganisasi secara kooperatif untuk mengatasi kesulitan para petani.

Tabel 1. Perkembangan koperasi aktif di Indonesia

Akhir Tahun	Jumlah Koperasi Aktif		%
	Nasional	Jawa Timur	
2018	126.343	24.024	19,0
2019	123.048	21.757	17,6
2020	127.124	22.464	17,6

Sumber: BPS, 2020

Keberadaan koperasi pertanian diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Namun demikian, selama ini, keberadaan dan eksistensi koperasi pertanian tidak menjadi prioritas.

Indonesia merupakan salah satu negara agraris. Hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan lahan pertanian dan perkebunan. Sektor pertanian berperan penting dalam menopang perekonomian masyarakat khususnya dalam produksi pangan. Oleh sebab itu, sektor ini harus dijadikan pijakan yang kokoh sehingga di pedesaan bisa tercapai swasembada berbagai produk pertanian, terutama pangan [5]. Salah satu daerah yang memiliki potensi dalam sektor pertanian dan perkebunan adalah Kabupaten Sumenep. Kabupaten Sumenep yang dibagi menjadi dua wilayah daratan dan kepulauan memiliki 27 wilayah kecamatan, 4 kelurahan, dan 328 desa. Panen padi sawah Kabupaten Sumenep pada tahun 2009 mencapai 29.895 hektar, dengan produksinya sebesar 1.784.245,8 kuintal [6].

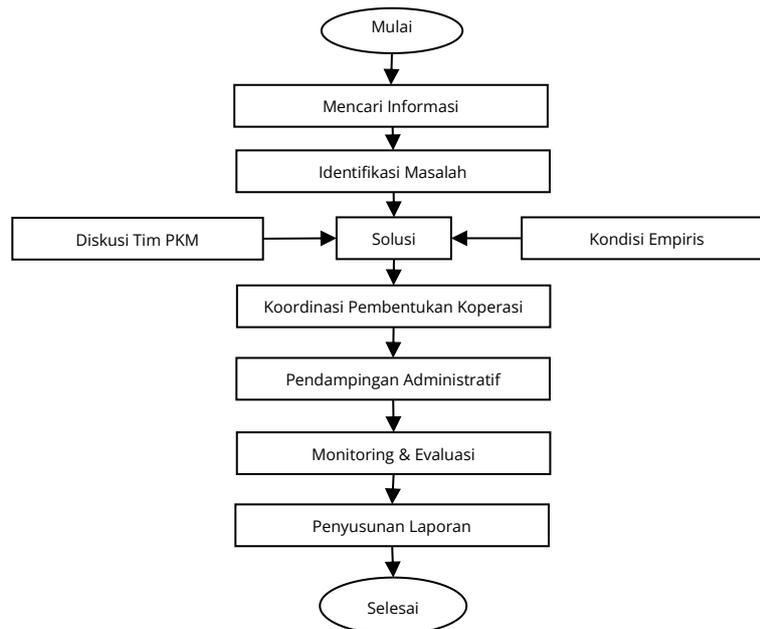
Salah satu wilayah di Kabupaten Sumenep yang memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang cukup luas adalah Desa Gadding, Kecamatan Manding. Desa Gadding memiliki luas 14,25 km² dengan jumlah penduduk sekitar 4.014; terletak pada lokasi +15 km ke arah utara dari Kabupaten Sumenep; memiliki area pertanian dan perkebunan yang cukup luas, yaitu 1.052,12 ha yang dapat menghasilkan produk pertanian berupa padi, jagung, dan kacang-kacangan. Selain itu, desa Gadding juga menghasilkan ketela dan tembakau dengan kualitas yang baik. Meski memiliki area yang cukup luas dan menghasilkan bermacam produk pertanian dan perkebunan, namun desa Gadding belum memiliki lembaga keuangan yang dapat mendukung permodalan para petani. Tidak sedikit petani saat musim tanam mengalami kesulitan dalam permodalan. Para petani yang mengalami kesulitan permodalan harus menjual ternaknya atau cenderung meminjam kepada perorangan yang tentu cukup memberatkan saat pengembalian. Dengan kondisi tersebut, perlu adanya suatu pergeseran paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi kerakyatan, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat [7].

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tentang Perkoperasian, 1992). Selanjutnya, koperasi sesungguhnya memiliki cakupan multidimensi yang bersifat strategis terhadap proses pembangunan bangsa Indonesia sebab eksistensi dan kehadiran koperasi di tengah masyarakat yang lemah sosial ekonominya menyandang empat karakteristik sekaligus, yakni suatu sistem normatif, suatu mekanisme pendidikan, organisasi ekonomi, dan organisasi kekuatan [8].

Berdasarkan beberapa permasalahan mitra, perlu ada lembaga keuangan (koperasi) yang dapat mendukung permodalan para petani. Oleh sebab itu, Tim PKM Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya melakukan suatu kegiatan yang bertema *Pendampingan Administrasi Pembentukan Koperasi di Kabupaten Sumenep*. Dengan terbentuknya koperasi, diharapkan mampu membawa pembaruan kehidupan masyarakat dari masyarakat yang penuh dengan kepincangan sosial dan keresahan sosial ke arah masyarakat yang dicita-citakan bersama atau ideal, yaitu masyarakat adil dan makmur [9].

2. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat. Masyarakat secara mandiri, berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal yang dimiliki, baik dari segi materiel maupun non-materiel, bersama-sama akan membangun koperasi [10], [11]. Metode pendekatan yang ditawarkan ini untuk menyelesaikan persoalan mitra yang telah disepakati bersama. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan utama mitra dalam kurun waktu realisasi program adalah dengan memberikan pendampingan dalam membentuk koperasi syariah, mulai dari menyiapkan syarat administrasi, pembuatan AD/ART, serta pembuatan SOP



Gambar 1. Strategi metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat

sebagai syarat dalam mendirikan koperasi syariah. Metode pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Gambar 1.

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pendampingan baik secara langsung maupun menggunakan metode daring yang dilakukan oleh Tim PKM, Universitas Negeri Surabaya mengenai penyiapan dokumen administrasi yang dibutuhkan dalam pembentukan koperasi. Metode pelaksanaan kegiatan atau pemecahan masalah yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan mitra dibagi menjadi empat tahapan, yaitu persiapan, sosialisasi, pelaksanaan pendampingan, dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari persiapan dengan melakukan koordinasi dengan mitra. Tahap kedua yaitu pelaksanaan. Tahap ini dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi terkait koperasi dan cara pembentukannya. Selanjutnya, dilakukan pendampingan, yakni penyampaian materi perkoperasian (pengantar koperasi, teori koperasi, manajemen koperasi, dan pelatihan koperasi) serta pelatihan koperasi (persiapan dengan membentuk panitia, rapat pengurus, rapat pengoperasian, penyusunan AD/ART, dan persiapan dalam pengajuan). Sebelum mengajukan pengesahan ke Dinas Koperasi dan UMKM, dilakukan tahap evaluasi untuk memastikan kelengkapan administrasi pengajuan pengesahan koperasi. Sementara itu, *monitoring* dilakukan setelah pengajuan dan operasional koperasi sebagai mitra.

3. Hasil dan Pembahasan

Pada umumnya, koperasi dikendalikan bersama oleh seluruh anggota. Setiap anggota berhak atas hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil oleh koperasi. Di sini, keinginan individu dapat dipuaskan dengan saling bekerja sama antara anggotanya dengan saling membantu dan menguntungkan. Hasil dari koperasi ini, yang berupa surplus (SHU), akan dibagikan secara merata kepada setiap anggotanya dengan metode yang telah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, dijelaskan bahwa fungsi dari koperasi sebagai pembangun dan pengembang potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Koperasi juga berfungsi guna memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.

Koperasi yang diselenggarakan dan ditujukan untuk masyarakat desa juga merupakan sebuah wadah bagi kelompok petani dan peternak guna menciptakan norma dan nilai-nilai mereka. Selama ini, kelompok tani berfungsi sebagai wadah bagi petani untuk beredukasi tentang pertanian ataupun manajemen pengelolaan hasil pertanian. Namun, keberadaan kelompok tani yang ada selama ini belum mampu mendukung para petani dalam hal permodalan. Petani selalu mengalami kesulitan permodalan saat musim tanam. Tidak sedikit yang harus menjual ternaknya dan ada juga yang harus meminjam ke rentenir (litah darat) dalam mencukupi modal pertaniannya.

Universitas Negeri Surabaya melalui Tim PKM Fakultas Ekonomika dan Bisnis mengambil peran dalam rangka membantu masyarakat guna mempermudah akses permodalan para petani. Salah satu bentuk bantuan Unesa adalah melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam mendirikan lembaga keuangan (koperasi syariah) yang dapat membantu permodalan para petani dan meningkatkan kewirausahaan para pemuda desa tersebut. Adapun bentuk bantuan yang dilakukan dalam pendampingan dijabarkan sebagaimana berikut.

3.1 Tahap Persiapan

Persiapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan melakukan pembagian tim dan koordinasi dengan mitra. Untuk pembagian tim, dilakukan dengan membagi tim menjadi dua, yaitu tim sosialisasi dan pendampingan. Tim sosialisasi menyiapkan dokumen sosialisasi untuk pendirian koperasi. Adapun dokumen yang disiapkan seperti draf AD-ART, struktur koperasi, neraca koperasi, dan aturan-aturan terkait pendirian koperasi. Sedangkan tim koordinasi melakukan koordinasi dengan perwakilan mitra dan menyusun agenda sosialisasi serta pendampingan pembuatan dokumen administrasi pendirian koperasi.

3.2 Tahap Sosialisasi

Tahap sosialisasi dilakukan secara daring. Kegiatan ini diikuti oleh para calon pendiri atau anggota koperasi. Sosialisasi ini sangat penting dilakukan guna menanamkan nilai-nilai dan semangat koperasi, manfaat yang diperoleh dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, kewajiban dan hak anggota. Mengingat pentingnya anggota, sebelum koperasi terbentuk, para anggota harus ditingkatkan kualitas pemahamannya terkait dasar koperasi dan pelaksanaan kerjanya. Adapun materi yang disampaikan terkait dengan perkoperasian, pendirian koperasi, prinsip koperasi, kepengurusan yang kemudian diatur dalam AD-ART koperasi, operasional koperasi, dan RAT.

3.3 Tahap Pendampingan

Tahap pendampingan ini didahului dengan melakukan rapat pendahuluan. Dalam rapat tersebut, diputuskan pendampingan akan dilakukan beberapa kali, baik daring maupun luring. Hal ini dilakukan karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19 dan masih ada PPKM Jawa-Bali. Selain itu, rapat juga memutuskan melakukan penunjukan koordinator guna mempermudah komunikasi dalam proses pendampingan pembuatan dokumen pendirian koperasi.

Selanjutnya, dilakukan pendampingan pembuatan dokumen pendirian koperasi. Adapun dokumen yang telah disiapkan antara lain pengumpulan fotokopi KTP pendiri sebanyak 22 orang, draf AD-ART, surat kuasa pendiri (pengurus terpilih sementara) untuk mengurus pengesahan pembentukan koperasi, rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun ke depan, rencana anggaran belanja dan pendapatan koperasi, daftar susunan pengurus dan pengawas, dokumen surat permohonan pendirian koperasi, dan notula rapat.

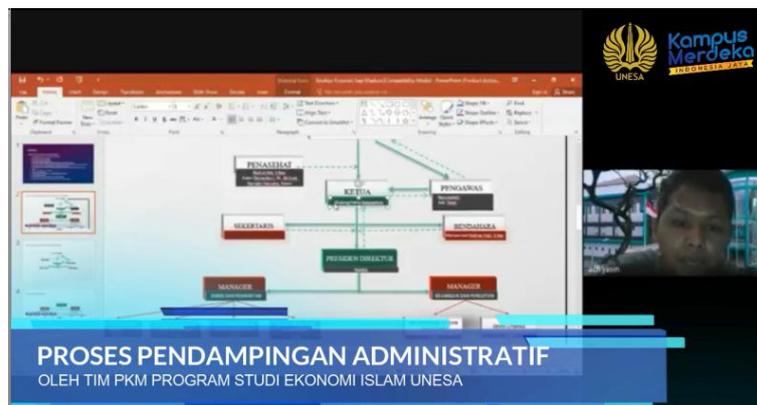
Rapat pembuatan draf AD-ART memutuskan tentang: nama koperasi, nama para pendiri, alamat tetap atau tempat kedudukan koperasi, jenis koperasi, jangka waktu berdiri, maksud dan tujuan, keanggotaan koperasi, perangkat organisasi koperasi, modal koperasi, besarnya jumlah setoran simpanan pokok dan wajib, bidang dan kegiatan usaha koperasi, pengelolaan, pembagian

sisanya hasil usaha, perubahan anggaran dasar, ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya, serta hapusnya status badan hukum, serta sanksi dan peraturan khusus. Hasil pendampingan pembuatan draf AD-ART juga memutuskan nama koperasi, yaitu Neraca Mekar Nusantara. Adapun dokumentasinya dapat dilihat pada Gambar 2–5.

Dalam rapat pembentukan struktur, diputuskan struktur koperasi yang terdiri dari Rapat Anggota Tahunan (RAT), Penasehat yang dijabat oleh tiga anggota koperasi, Pengawas yang juga dijabat tiga anggota koperasi, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Jabatan struktur koperasi ini berlaku selama satu tahun dan akan dilaksanakan RAT setelah satu tahun terbentuknya koperasi tersebut. Selanjutnya, setelah AD-ART dan struktur koperasi terbentuk, Tim PKM melakukan



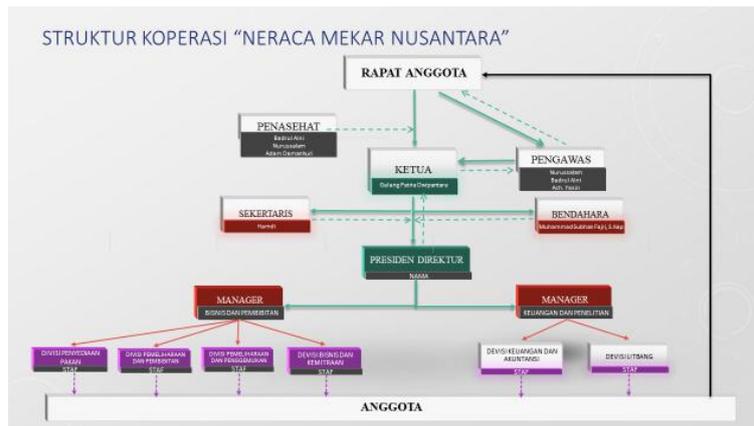
Gambar 2. Pendampingan administrasi ke-1 Neraca Mekar Nusantara secara luring dalam pembuatan nama koperasi dan dokumen pendirian



Gambar 3. Pendampingan administrasi ke-2 Neraca Mekar Nusantara secara daring dalam penyusunan struktur organisasi koperasi, pengurus, dan rencana kegiatan koperasi



Gambar 4. Hasil draf AD-ART Neraca Mekar Nusantara



Gambar 5. Struktur koperasi Neraca Mekar Nusantara

koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Hasil koordinasi dengan dinas, tim diminta untuk segera memasukkan surat permohonan pengesahan koperasi dengan melengkapi dokumen persyaratan pendirian koperasi.

3.4 Tahap Evaluasi dan *Monitoring*

Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan melihat ketercapaian indikator yang telah ditetapkan. Evaluasi keberlanjutan program dilakukan untuk memantau apakah program proses pengesahan pendirian koperasi telah selesai atau masih berjalan setelah kegiatan pengabdian selesai dilaksanakan. *Monitoring* dilakukan dengan tetap melakukan pendampingan kepada mitra meskipun kegiatan pengabdian telah selesai. Tim pengabdian masih tetap memberikan layanan konsultasi dan diskusi dengan mitra. Melalui cara tersebut evaluasi dan *monitoring* secara keberlanjutan program dapat dilaksanakan dan dipantau.

4. Kesimpulan

Kesimpulan hasil pengabdian Pembentukan Koperasi Syariah dalam Upaya Mempermudah Akses Permodalan di Kabupaten Sumenep telah dilaksanakan. Hasil dari pendampingan tersebut berupa dokumen persyaratan pendirian koperasi yang sudah siap dan diajukan ke Dinas Koperasi dan UMKM. Selain itu, pendampingan dapat menambah wawasan bagi pengurus dalam melakukan pembentukan koperasi syariah dalam upaya meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian dan peternakan di Kabupaten Sumenep. Selanjutnya, dengan berdirinya koperasi, diharapkan dapat mempermudah masyarakat atau anggota koperasi dalam berwirausaha dan dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Program pengabdian masyarakat dalam bentuk pendampingan ini perlu secara terus-menerus dilakukan dalam rangka agar dapat memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat dan diharapkan tidak berhenti sampai proses pendirian saja, melainkan juga pendampingan dalam pengelolaan operasional koperasi.

Daftar Pustaka

- [1] Mutiarni, R., Utomo, L. P., & Zuhroh, S, (2017) "Pendampingan Pencatatan Transaksi Keuangan Pada Koperasi Bunga Harapan Desa Ceweng," *Comvice: Journal Of Community Service*, vol. 1, no. 1, pp. 33-38.
- [2] Raharjo, D., (1997). *Koperasi Indonesia Menghadapi Abad ke-21*, Jakarta: Dekopin.
- [3] BPS, (2020) "Jumlah Koperasi di Jawa Timur," BPS, Jatim.

- [4] Djohan, D & Krisnamurthi, B., (2000). Membangun Koperasi Pertanian Berbasis Anggota, Jakarta: LSP21 Bekerja Sama dengan INKOPDIT dan YAPPIKA.
- [5] Basri. Y. bZ., (2003). "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan, dalam Usahawan Indonesia No 03/TH.XXXII Maret 2003," *Basri. Y. bZ., 2003, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan, dalam Usahawan Indonesia No 03/TH.XXXII Maret 2003, Lembaga Manajemen, FE-UI, Jakarta: halaman 49-55.*, pp. 49-55, Lembaga Manajemen, FE-UI, Jakarta Maret 2023.
- [6] BPS Sumenep, (2020) "Kabupaten Sumenep dalam Angka," BPS Kabupaten Sumenep, Sumenep 2020.
- [7] Arsiyah, (2019) "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa," *Jurnal Wacana*, vol. 12, no. 2, pp. 370-375.
- [8] Bangsawan, S., (2016)., Manajemen Pemasaran Usaha Koperasi (Mahrinasari, Ed.), Bandar Lampung: AURA.
- [9] Siswoyo, dkk., (2012) Pengembangan Koperasi Wanita: Materi Pendampingan Koperasi Wanita Di Jawa Timur, Malang: Kerjasama Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur dengan Universitas Negeri Malang.
- [10] Syahril, S., Hamzah, A., & Nasir, M. (2015). "Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampung Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Aceh," *Jurnal Ilmu Ekonomi*, vol. 3, no. 2, pp. 54-64.
- [11] Widjajanti, K., (2011) "Model Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, pp. 15-27.

Afiliasi:

Ach. Yasin^{1,*}, Moch. Khoirul Anwar², Sri Abidah Suryaningsih³, A'rasy Fahrullah⁴, Ahmad Ajib Ridlwan⁵

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya
Jl. Ketintang No.2, Ketintang, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur, 60231

Email : ^{1,*}ach.yasin@unesa.ac.id, ²khoirulanwar@unesa.ac.id,
³sriabidah@unesa.ac.id, ⁴rasyfahrullah@unesa.ac.id, ⁵ahmadajibridlwan@unesa.ac.id

Adam Damanhuri⁶

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya
Jalan Kampus Lidah Wetan, Surabaya, 60213

Email : ⁶adamdamanhuri@unesa.ac.id